

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kawasan Strategis SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)

Putu Ayu Pramitha Purwanti¹⁾, Ni Putu Wiwin Setyari²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana²⁾
pramitha@unud.ac.id¹⁾, wiwin.setyari@unud.ac.id²⁾

Abstract

This study aims, firstly, to find out the category of district/city areas in the SARBAGITA area with Klassen typology. Second, knowing the level of economic inequality in urban districts in the SARBAGITA area with the Williamson index. Third, knowing the relationship between growth and economic inequality in the SARBAGITA region by testing the Kuznets hypothesis. The analysis was carried out using secondary data with the results, first, that in the SARBAGITA area there are still districts as relatively underdeveloped areas which indicate that the spread effect of the regional center development is not yet optimal. Second, the absolute level of economic inequality shows fluctuations, but if viewed based on trends, it shows a positive trend. This means that the longer the period, the higher the level of inequality. The final result is the proof of Kuznets hypothesis in the SARBAGITA area. At the beginning of the study period, economic growth was followed by an increase in inequality but at a certain point, the inequality decreased. Thus, we need a regional planning that can create a balance of economic growth so that inequality between regions can be minimized or even avoided.

Keywords: *Kuznets Hypothesis, Williamson Index, Inequality, Economic Growth, SARBAGITA, Klassen Typology*

Abstrak

Studi ini bertujuan pertama, mengetahui kategori wilayah kabupaten/kota di kawasan SARBAGITA dengan tipologi Klassen. Kedua, mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten kota di Kawasan SARBAGITA dengan indeks Williamson. Ketiga, mengetahui hubungan pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di kawasan SARBAGITA dengan melakukan uji hipotesis Kuznets. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder dengan hasil, pertama, di kawasan SARBAGITA masih ada kabupaten sebagai daerah relatif tertinggal yang mengindikasikan spread effect dari pembangunan pusat kawasan belum optimal. Kedua, tingkat ketimpangan ekonomi secara absolut menunjukkan fluktuasi, namun jika dilihat berdasarkan trend, menunjukkan trend yang positif. Ini berarti semakin bertambahnya periode waktu, tingkat ketimpangan semakin tinggi. Hasil terakhir adalah terbuktinya hipotesis Kuznets di kawasan SARBAGITA. Pada awal periode studi, pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan ketimpangan namun pada titik tertentu, ketimpangan tersebut mengalami penurunan. Dengan demikian, diperlukan suatu perencanaan wilayah yang mampu menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi sehingga ketimpangan antar wilayah dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari.

Kata Kunci: *Hipotesis Kuznets, Indeks Williamson, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, SARBAGITA, Tipologi Klassen.*

PENDAHULUAN

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terletak di wilayah Provinsi Bali. Kawasan SARBAGITA terbentuk secara resmi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.¹ Kawasan ini sebagai kawasan perkotaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berbeda dengan kawasan perkotaan lainnya, SARBAGITA masih mempertahankan sektor pertanian untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan ekonomi.

Kawasan perkotaan SARBAGITA terdiri dari Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Keseluruhan, kawasan ini meliputi 15 kecamatan yaitu Kota Denpasar mencakup 4 kecamatan (Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat), Kabupaten Badung mencakup 5 kecamatan (Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan), Kabupaten Gianyar mencakup 4 kecamatan (Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, dan Ubud) dan Kabupaten Tabanan mencakup 2 kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri).

Secara implisit pembentukan kawasan akan memstimulasi berkembangnya wilayah di sekitar kawasan di samping memicu pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan itu sendiri. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Sukirno, 1985). Salah satu indikator kegiatan ekonomi yang sering digunakan adalah adanya peningkatan pendapatan regional yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi nilai PDRB dengan pertumbuhan yang positif, mengindikasikan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan semakin baik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi bisa menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Nilai PDRB di kabupaten/kota kawasan SARBAGITA dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan trend masing-masing wilayah, seluruh wilayah menunjukkan trend yang positif dimana nilai PDRB masing-masing wilayah setiap tahunnya mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Badung dan Kota Denpasar jauh di atas PDRB Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Tabanan bernilai kurang

¹ Peraturan ini kemudian mengalami perubahan yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung Gianyar dan Tabanan.

dari setengah PDRB Kota Denpasar. PDRB Kabupaten Gianyar tidak jauh berbeda kondisinya meskipun nilainya secara rata-rata masih lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan. Nilai PDRB sebagai salah satu indikator kesejahteraan menunjukkan belum terjadi pemerataan tingkat kesejahteraan antara kabupaten/kota kawasan SARBAGITA.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten/Kota Kawasan SARBAGITA Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)**

Tahun	Kab. Tabanan	Kab. Badung	Kab. Gianyar	Kota Denpasar
2014	11,908,000,000	27,458,060,000	14,269,420,000	26,778,590,000
2015	12,644,520,000	29,170,240,000	15,168,550,000	28,422,700,000
2016	13,420,550,000	31,157,370,000	16,125,280,000	30,273,390,000
2017	14,141,510,000	33,053,320,000	17,008,760,000	32,109,430,000
2018	14,950,230,000	35,283,960,000	18,031,300,000	34,168,100,000
Rata-rata	13,412,962,000	31,224,590,000	16,120,662,000	30,350,442,000

Sumber: BPS (2019)

Pada tabel 2 terlihat bahwa pertumbuhan kabupaten/kota yang berada di kawasan SARBAGITA mengalami fluktuasi namun secara rata-rata laju pertumbuhan menunjukkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai kawasan inti memiliki laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Gianyar dan Tabanan. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di dalam kawasan belum merata.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota Kawasan Perkotaan SARBAGITA Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (%)					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kab. Tabanan	6.53	6.19	6.14	5.37	5.72	5.99
Kab. Badung	6.98	6.24	6.81	6.09	6.75	6.574
Kab. Gianyar	6.8	6.3	6.31	5.48	6.01	6.18
Kota Denpasar	7	6.14	6.51	6.06	6.41	6.424

Sumber: BPS (2019)

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan diikuti oleh pemerataan antar wilayah di kawasan strategis sehingga fungsi kawasan benar-benar mampu menjadi pusat pertumbuhan yang menstimulasi pertumbuhan wilayah-wilayah di sekitar kawasan. Sebagai langkah awal, diperlukan identifikasi mengenai kondisi serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di dalam kawasan SARBAGITA. Studi ini bertujuan pertama, mengetahui kategori wilayah kabupaten/kota di kawasan SARBAGITA dengan tipologi Klassen. Kedua, mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten kota di Kawasan SARBAGITA dengan indeks Williamson. Ketiga, mengetahui hubungan pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di kawasan SARBAGITA dengan melakukan uji hipotesis Kuznets.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah namun di sisi lain ketika pertumbuhan ekonomi dicapai, tidak menjamin terjadinya pemerataan. Kondisi idealnya adalah ketika terjadi pertumbuhan yang pesat di satu wilayah akan berpengaruh positif terhadap daerah-daerah sekitarnya sehingga daerah-daerah tersebut juga mampu berkembang pesat. Penyebaran pengaruh positif tersebut dikenal sebagai *spread effect* (Arsyad, 1999). Menurut Sjafrizal (2014), pembangunan yang pesat tanpa dibarengi dengan pemerataan terjadi karena beberapa hal, diantaranya, pertama, perbedaan kandungan sumberdaya alam yang berpengaruh terhadap kegiatan produksi di wilayah bersangkutan. Wilayah dengan sumberdaya yang besar akan mampu memproduksi output lebih banyak. Kedua, perbedaan kondisi demografis dimana perbedaan kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di wilayah tersebut. Ketiga, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah akan cenderung lebih cepat jika terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Keempat, alokasi dana pembangunan antar wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah salah satunya ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Jika pemerintahan daerah yang dianut adalah sentralistik, maka alokasi dana pembangunan cenderung terkonsentrasi di pusat. Jika sistem pemerintahan bersifat otonomi ataupun desentralisasi, maka dana pembangunan akan lebih dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan antar wilayah cenderung bisa dikurangi.

Kaum Neo-Klasik menyatakan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan tahapan pembangunan kurang berjalan lancar sehingga cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan semakin melebar (*divergence*). Bila tahapan pembangunan itu terus berlanjut dimana sarana dan prasarana semakin lengkap sehingga mobilitas modal dan tenaga kerja semakin lancar, maka ketimpangan pembangunan regional dapat berkurang (*convergence*). Dengan demikian, ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik (*Inverted U-shaped curve*). Dengan demikian, negara berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi dan pada negara maju ketimpangan semakin rendah (Sjafrizal, 2008).

Williamson (1965) membuktikan hubungan antar disparitas wilayah/regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dan menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dimana pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Kuznets juga menyatakan hal yang serupa (Todaro & Smith, 2013). Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terjadinya pemerataan antar wilayah maka diperlukan suatu perencanaan wilayah yang mampu menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ketimpangan antar wilayah dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari.

METODE

Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010, jumlah penduduk, laju pertumbuhan PDRB, dan PDRB per kapita. Periode studi selama delapan tahun yaitu 2011-2018. Periode ini diambil untuk memberikan gambaran kondisi awal pembentukan kawasan.

Analisis menggunakan beberapa metode. Analisis pertama, Tipologi Klassen untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan wilayah kabupaten/kota di kawasan SARBAGITA. Kedua, Indeks Williamson untuk mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi kabupaten/kota di Kawasan SARBAGITA. Ketiga, hipotesis Kuznets untuk mengetahui hubungan pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di kawasan SARBAGITA.

Tipologi Klassen

Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan SARBAGITA. Formulasi alat analisis ini sebagai berikut.

Tabel 3. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen

PDRB perkapita (y) Laju Pertumbuhan r	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah maju dan tumbuh pesat	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber: Sjafrizal (1997)

Keterangan:

r_i = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota i

r = laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Bali

y_i = Pendapatan perkapita kabupaten/kota i

y = Pendapatan perkapita Provinsi Bali

Menurut tipologi daerah, daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi (Kuncoro, 2004) yaitu: (1) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah; (2) Daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata; (3) Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan, tetapi tingkat perkapita lebih rendah dari rata-rata; (4) Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah.

Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di kawasan SARBAGITA dianalisis menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ketimpangan regional ini semula digunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Komposisi utama indeks Williamson yaitu

membandingkan tingkat pendapatan perkapita dan jumlah penduduk, yaitu dengan formulasi sebagai berikut (Sjafrizal, 2012):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i = pendapatan per kapita di kabupaten/kota i

Y = pendapatan per kapita rata-rata Provinsi Bali

f_i = jumlah penduduk di kabupaten/kota i

n = jumlah penduduk Provinsi Bali

Indeks Williamson (IW) memiliki nilai antara 0 sampai dengan satu. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dengan indeks Williamson dapat dikategorikan sebagai berikut (Sjafrizal, 1997):

(1) Bila $IW < 0,3$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah rendah; (2) Bila $0,3 \leq IW \leq 0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang dan (3) Bila $IW > 0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi.

Hipotesis Kuznets

Menurut Kuncoro (2001), untuk menguji hipotesis Kuznets dapat digunakan analisis trend. Analisis trend antara indeks ketimpangan baik indeks ketimpangan Williamson dihubungkan dengan pertumbuhan perekonomian dari suatu daerah. Berdasarkan kurvanya dapat dilihat bentuk kecenderungannya berbentuk linier atau non linier. Hipotesis Kuznets dilihat dari grafik antara pertumbuhan produk domestik regional bruto dan indeks ketimpangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson pada periode pengamatan. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk atau ketimpangan akan meningkat. Pada tahap berikutnya ketimpangan tersebut akan menurun dan pemerataan produk domestik regional bruto (PDRB) akan dicapai (Todaro & Smith, 2013).

Pengujian juga dilakukan dengan regresi nonlinear. Regresi nonlinear kuadratik merupakan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dan kuadratnya sehingga diperoleh kurva yang membentuk garis melengkung ($\beta_2 > 0$) atau menurun ($\beta_2 < 0$) (Steel & Torrie, 1980). Model estimasi yang digunakan untuk studi ini adalah

$$IW = \alpha + \beta_1 G + \beta_2 G^2 + e$$

dimana:

IW = indeks Williamson

G = pertumbuhan ekonomi

G^2 = pertumbuhan ekonomi kuadrat

α = konstanta

β_1 dan β_2 = koefisien regresi

HASIL

Analisis berdasarkan pola dan struktur pertumbuhan wilayah, kategori kabupaten/kota di kawasan strategis dapat terlihat seperti Tabel 4. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten kota kawasan SARBAGITA terbagi menjadi tiga yaitu daerah maju dan tumbuh cepat, daerah berkembang cepat serta daerah relative tertinggal.

Tabel 4. Tipologi Klassen

Daerah Maju dan Tumbuh Cepat	Daerah Berkembang Cepat
Kabupaten Badung Kota Denpasar	Kabupaten Gianyar
Daerah Maju tetapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal
	Kabupaten Tabanan

Sumber: data diolah (2021)

Daerah maju dan tumbuh cepat merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah. Daerah/wilayah yang masuk ke dalam kategori tersebut adalah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang memiliki potensi pembangunan yang besar serta telah memanfaatkannya secara baik untuk kemakmuran masyarakatnya. Hal yang kontras terjadi pada Kabupaten Tabanan dimana kabupaten ini masuk ke dalam kategori daerah yang relatif tertinggal. Kabupaten Tabanan memiliki tingkat pendapatan maupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan dan pertumbuhan Provinsi Bali. Berbeda halnya dengan Kabupaten Gianyar. Kabupaten ini masuk ke dalam sebagai daerah yang berkembang cepat dengan rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dibanding Provinsi Bali namun tingkat pendapatannya masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali. Pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Gianyar relatif masih rendah namun di masa yang akan datang akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson (tabel 5), terlihat bahwa nilai rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,279. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi maka tingkat ketimpangan yang terjadi di kawasan SARBAGITA adalah ketimpangan ekonomi tingkat rendah karena nilai indeks di bawah 0,3. Ketimpangan ini juga terjadi di setiap tahun dengan fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Ini berarti pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain di kawasan SARBAGITA memang terjadi ketidakmerataan pertumbuhan namun ketidakmerataan tersebut tidak dalam kategori yang berat.

Tabel 5. Indeks Williamson

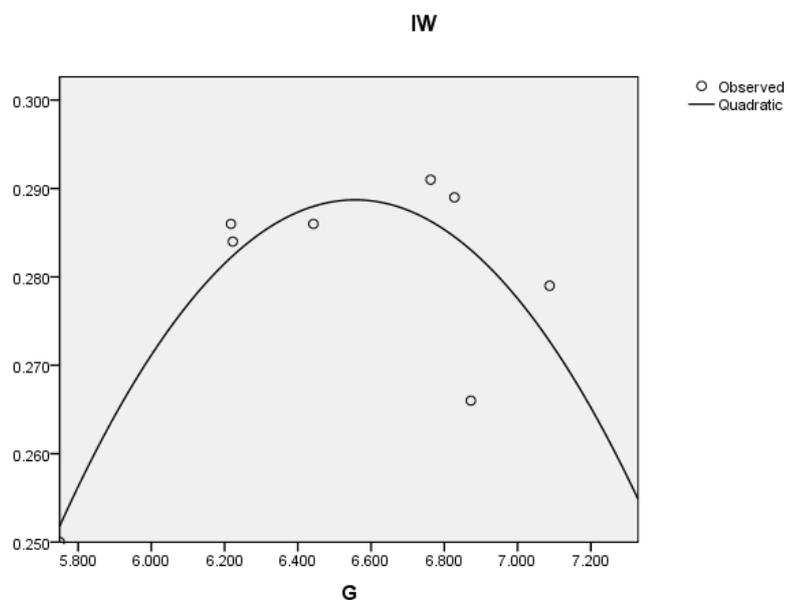
TAHUN	Indeks Williamson
2011	0.266
2012	0.279
2013	0.291
2014	0.289
2015	0.286
2016	0.286
2017	0.250
2018	0.284
Rata-rata	0.279

Sumber: data diolah (2021)

Pengujian terhadap hipotesis Kuznets menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks ketimpangan Williamson di kawasan SARBAGITA memiliki bentuk huruf U terbalik. Hal ini mengindikasikan pada awal periode pembangunan, pertumbuhan ekonomi meningkat sampai pada titik tertentu dan peningkatan pertumbuhan akan diikuti oleh penurunan ketimpangan atau munculnya pemerataan. Hubungan ini didukung dengan pengujian secara statistik terhadap model kuadrat dimana variabel pertumbuhan (G) berpengaruh signifikan positif dan variabel pertumbuhan kuadrat (G^2) berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Indeks Williamson.

Persamaan yang diperoleh:

$$\begin{aligned}
 IW &= -0,15 + 0,74G - 0,05G^2 \\
 &\quad (0,79) \quad (0,25) \quad (0,02) \\
 t &= (-2,73) \quad (3,03) \quad (-2,98) \\
 R^2 &= 0,71 \\
 F &= 6,18 \text{ (sig 0,04)}
 \end{aligned}$$



Gambar 1. Hipotesis Kuznets
Sumber: data diolah (2021)

PEMBAHASAN

Kabupaten Badung dan kota Denpasar memiliki tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi di atas pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan daerah acuan yaitu Provinsi Bali. Hal tersebut sangat wajar terjadi mengingat kedua wilayah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali yang tidak saja menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial namun juga menjadi pusat pemerintahan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan memstimulasi perkembangan berbagai sektor. Keterkaitan antar sektor ekonomi di Kota Denpasar baik keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkage*) akan memberikan efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor lain termasuk juga sektor input salah satunya tenaga kerja. Wilayah lain yang masuk ke dalam daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah adalah Kabupaten Badung. Hal ini terjadi karena Kabupaten Badung merupakan pusat destinasi wisata yang ada di Pulau Bali. Kabupaten ini memiliki destinasi terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Bali. Sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata merupakan sektor penggerak pertumbuhan di Kabupaten Badung. Berbagai jenis atraksi wisata ditawarkan di setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Badung dan saat ini Kabupaten Badung sedang gencar memperkenalkan obyek-obyek wisata alam khususnya wisata pantai. Pariwisata yang ditawarkan selalu memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki dengan latar belakang budaya masyarakat Bali pada umumnya.

Wilayah kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Tabanan masuk ke dalam kategori daerah relatif tertinggal. Ini berarti Kabupaten Tabanan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, daya beli masyarakat, tingkat harapan hidup, dan kemiskinan (Ariani & Juliannisa, 2021). Tidak demikian halnya dengan kondisi di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan dikenal sebagai lumbung padinya Bali. Kabupaten Tabanan memiliki luasan wilayah pertanian yang cukup luas jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada umumnya sistem pertanian yang dilakukan masih bersifat tradisional. Terdapat beberapa hal yang menjadi isu mengapa output pertanian di Kabupaten Tabanan yang notabene sebagai lumbung padi Bali tidak mampu memproduksi secara optimal. Pertama, proses produksi dan pasca produksi masih mengutamakan tenaga manusia. Tenaga kerja yang digunakan cenderung melebihi dari yang dibutuhkan sehingga produktivitas setiap tenaga kerja menjadi sangat rendah. Kedua, luas lahan yang dimiliki oleh setiap petani tidak cukup luas, sehingga dalam proses produksi dan pasca produksi menimbulkan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Kendala-kendala tersebut, menyebabkan pertumbuhan sektor yang seharusnya sebagai sektor penggerak pertumbuhan tidak mampu memacu pertumbuhan daerah namun tidak berarti daerah ini tidak akan berkembang di masa yang akan datang. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, termasuk akses pendidikan bagi masyarakat setempat akan mampu membawa daerah tertinggal mengejar ketertinggalannya (Sjafrizal, 1997).

Lain halnya dengan Kabupaten Gianyar. Kabupaten ini sangat erat dengan kesenian meskipun aktivitas ekonomi masih disokong oleh sektor primer yaitu pertanian. Sektor yang berkembang di kabupaten Gianyar adalah sektor industri dan juga sektor yang berkaitan dengan

pariwisata. Hal ini terjadi karena Kabupaten Gianyar merupakan salah satu sentra kerajinan yang ada di Bali. Produk-produk yang dihasilkan tidak saja dipasarkan secara lokal namun juga internasional. Namun perkembangan sektor-sektor tersebut memiliki kendala sehingga sulit untuk berkembang. Kendala tersebut diantaranya kendala dalam input modal dan kendala pemasaran. Masih banyak pelaku industri yang belum memperoleh akses modal untuk mengembangkan usahanya dan ketika pengrajin sudah menghasilkan produk yang berkualitas, mereka tidak memiliki akses distribusi yang berkelanjutan. Hal-hal tersebut menyebabkan sektor penggerak pertumbuhan sulit untuk berkembang. Upaya yang dapat dilakukan bagi Kabupaten Gianyar untuk dapat berkembang pesat dan mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju salah satunya membuka akses terhadap sarana dan prasarana perekonomian sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi di Kawasan SARBAGITA belum mampu memberikan *spread effect* yang optimal bagi daerah-daerah di sekitarnya. Ini terbukti dari masih adanya daerah dalam kawasan yang masuk sebagai kategori daerah yang relatif tertinggal. Gambaran ketimpangan ini dikuatkan oleh nilai Indeks Williamson yang menunjukkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di dalam Kawasan SARBAGITA meskipun tingkat ketimpangan tersebut masih dalam kategori rendah. Terkait dengan hubungan antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan, terbukti bahwa pembangunan di Kawasan SARBAGITA memiliki pola kurva U terbalik. Ini menandakan bahwa pembangunan di Kawasan SARBAGITA pada awalnya memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi namun seiring dengan waktu telah mencapai puncaknya sehingga pembangunan sudah menuju pada tahap pemerataan.

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa kabupaten/kota di dalam kawasan perkotaan SARBAGITA mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda dan adanya ketimpangan antar wilayah meskipun ketimpangan tersebut dalam kategori rendah. Hubungan antara pertumbuhan dan tingkat ketimpangan tersebut selama terbentuknya kawasan menunjukkan bahwa periode awal terbentuknya kawasan menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan namun diiringi dengan peningkatan ketimpangan. Setelah titik waktu tertentu, hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan memiliki arah yang berlawanan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan terjadinya pemerataan antar wilayah. Temuan ini berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Berlianantiya (2017) di Jawa Timur dan Ismail (2020) di Kalimantan Barat. Kedua studi tersebut menemukan tidak terjadinya hubungan yang berbentuk *inverted U* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan. Terbuktinya hipotesis huruf U terbalik menunjukkan bahwa tahapan pembangunan di Kawasan SARBAGITA mengalami tahapan pembangunan pada umumnya dan sampai saat ini keberadaan Kawasan telah menuju pembangunan yang konvergen meskipun masih terdapat ketimpangan dalam kategori rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Adanya ketimpangan mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi daerah di wilayah kawasan SARBAGITA belum optimal. Fungsi wilayah inti yang seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap di daerah di sekitarnya belum terjadi. Kabupaten Tabanan belum mampu menyerap dampak positif pertumbuhan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Gianyar yang belum mampu menjadi daerah yang

maju dan tumbuh cepat. Ini mengimplikasikan perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dan peningkatan kerja sama bagi pengambil keputusan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi dapat dicapai secara bersama-sama.

Pembangunan wilayah yang bertetangga akan dapat mengembangkan daya pertumbuhan yang kuat dalam lingkungan suatu wilayah dan dapat pula mendorong wilayah-wilayah lainnya yang relatif terbelakang (Adisasmita, 2005). Regionalisasi dengan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi yang membina dan mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah dengan spesialisasi menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andhiani, K., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 26-34.
- Ariani, M., & Juliannisa, I. (2021). Analisis Indikator Komposit IPM dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 1-12.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur. *Equilibrium*, 163-171.
- Ismail, A. (2020). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020* (hal. 143-159). Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- Kuncoro, M. (2001). *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Teori Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuncoro, M., & Aswandi, H. (2002). Evaluasi Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 27-45.
- Sjafrizal. (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma*, 27-38.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Padang: Praninta Offset.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Steel, R., & Torrie, J. (1980). *Principle and Procedure of Statistic. Second Ed.* . New York: McGrawHill Book Company, Inc.

Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan* . Medan: Borta Gorat.

Todaro, M., & Smith, S. (2013). *Pembangunan Ekonomi*. Pembangunan Ekonomi: Erlangga.

Williamson, J. (1965). Regional Inequality and The Process of National Development, a Description of Pattern. *Economic Deelopment and Cultural Cahnge*, 1-84.